MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 293 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, dan mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional dipandang perlu menambah Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pemerintah;

b. bahwa untuk penambahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2083 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020);
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 173 Tahun 2024 tentang Panduan Penyusunan Rincian Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2024; dan

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 289 Tahun 2024 tentang Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Secara Nasional Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-250/MK.02/2024 tanggal 18 Maret 2024;
2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 7612/B-BP.02.01/SD/K/2023 tanggal 31 Juli 2023;
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pemerintah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Kualifikasi pendidikan dan syarat jabatan bagi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan pada Instansi Pemerintah merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

KETIGA : Syarat jabatan bagi jabatan pelaksana untuk klasifikasi teknisi merujuk pada Lampiran III Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah.

KEEMPAT : Pelaksanaan pengisian penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil tersebut, dilakukan oleh masing–masing Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing–masing Instansi Pemerintah.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 2 Juli 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN CCLXIII
KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 293 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
A.	TENAGA KESEHATAN	25	
1.	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | DINAS KESEHATAN | BIDANG KEFARMASIAN DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
2.	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | DINAS KESEHATAN | BIDANG MUTU TENAGA KESEHATAN DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
3.	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IR. SOEKARNO | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN | BIDANG PELAYANAN PENUNJANG | SEKSI PELAYANAN PENUNJANG MEDIS
4.	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS GATAK
5.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS POLOKARTO
6.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS NGUTER
7.	FISIKAWAN MEDIS AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IR. SOEKARNO | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN | BIDANG PELAYANAN PENUNJANG | SEKSI PELAYANAN PENUNJANG MEDIS
8.	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | DINAS KESEHATAN | BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
9.	PERAWAT AHLI PERTAMA	5	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IR. SOEKARNO | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN | BIDANG PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN | SEKSI PELAYANAN KEPERAWATAN
10.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS GROGOL
11.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS MOJOLABAN
12.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS BENDOSARI
13.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS WERU
14.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IR. SOEKARNO | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN | BIDANG PELAYANAN PENUNJANG | SEKSI PELAYANAN PENUNJANG MEDIS
15.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS KARTASURA
16.	RADIOGRAFER AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IR. SOEKARNO | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN | BIDANG PELAYANAN PENUNJANG | SEKSI PELAYANAN PENUNJANG MEDIS
17.	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS TAWANGSARI
18.	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS BAKI
19.	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS SUKOHARJO
20.	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS BULU

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
B.	TENAGA TEKNIS		75	
1.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN ; S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL
2.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
3.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | BIDANG KEPEMUDAAN
4.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
5.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK
6.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 PSIKOLOGI ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN ORGANISASI
7.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
8.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL
9.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | BIDANG PENATAAN DAN KERJASAMA DESA
10.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | BIDANG KELUARGA BERENCANA, KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
11.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
12.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN ; S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR
13.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 AKUNTANSI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | INSPEKTORAT DAERAH | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN PERENCANAAN, ANALISIS DAN EVALUASI
14.	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; S-1 ADMINISTRASI PAJAK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH | BIDANG PENDAPATAN I
15.	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; S-1 MANAJEMEN PAJAK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH | BIDANG ANGGARAN
16.	ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN AHLI PERTAMA	S-1 AGRIBISNIS ; S-1 EKONOMI PERTANIAN ; S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN ; S-1 SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN ; S-1 TEKNOLOGI HASIL PETERNAKAN ; S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | DINAS PANGAN | BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN
17.	ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN AHLI PERTAMA	S-1 AGRIBISNIS ; S-1 EKONOMI PERTANIAN ; S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN ; S-1 SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN ; S-1 TEKNOLOGI HASIL PETERNAKAN ; S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN | BIDANG TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
18.	ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM ; S-1 PSIKOLOGI ; D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
19.	ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN AHLI PERTAMA	D-IV EKONOMI ; D-IV GEODESI ; D-IV GEOGRAFI ; D-IV ILMU TANAH ; D-IV KIMIA ; D-IV PERTANIAN ; D-IV PLANOLOGI ; D-IV SOSIAL EKONOMI PERTANIAN ; D-IV TEKNIK KIMIA ; D-IV TEKNIK LINGKUNGAN ; D-IV TEKNIK PENGAIRAN ; D-IV TEKNIK PERTANIAN ; D-IV TEKNIK SIPIL ; S-1 AGROBISNIS ; S-1 AGRONOMI ; S-1 EKONOMI ; S-1 GEODESI ; S-1 GEOGRAFI ; S-1 ILMU TANAH ; S-1 KIMIA ; S-1 PLANOLOGI ; S-1 TEKNIK KIMIA ; S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN ; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK PENGAIRAN ; S-1 TEKNIK PERTANIAN ; S-1 TEKNIK SIPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN | BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
20.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ; D-III KEARSIPAN ; D-III ADMINISTRASI LAYANAN KESEHATAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IR. SOEKARNO | WAKIL DIREKTUR ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | BAGIAN UMUM | SUBBAG SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN
21.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III ADMINISTRASI BISNIS ; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN KEIMIGRASIAN ; D-III ADMINISTRASI PERPAJAKAN ; D-III ADMINISTRASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | SEKRETARIAT | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
		PUBLIK ; D-III MANAJEMEN ; D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN ; D-III PERPUSTAKAAN ; D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI ; D-III KEARSIPAN		
22.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN ; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN ; D-III MULTIMEDIA ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | BIDANG KEARSIPAN
23.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI BISNIS ; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III MANAJEMEN ; D-III KEARSIPAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | KECAMATAN SUKOHARJO | SEKRETARIAT | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
24.	ASISTEN PERPUSTAKAAN TERAMPIL	D-III PERPUSTAKAAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN HUKUM
25.	KONSELOR SDM	S-1 PSIKOLOGI ; S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG PEMBINAAN, KESEJAHTERAAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN
26.	MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
27.	PAMONG PEMERINTAHAN	S-1 EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | KECAMATAN BULU | SEKSI PEMERINTAHAN
28.	PAMONG PEMERINTAHAN	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; D-IV LAYANAN PUBLIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | KECAMATAN BENDOSARI | SEKSI PEMERINTAHAN
29.	PAMONG PEMERINTAHAN	S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | KECAMATAN POLOKARTO | SEKSI PEMERINTAHAN
30.	PAMONG PEMERINTAHAN	S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; D-IV LAYANAN PUBLIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | KECAMATAN GROGOL | SEKSI PEMERINTAHAN
31.	PAMONG PEMERINTAHAN	S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; D-IV LAYANAN PUBLIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | KECAMATAN BAKI | SEKSI PEMERINTAHAN
32.	PAMONG PEMERINTAHAN	S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; D-IV LAYANAN PUBLIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | KECAMATAN GATAK | SEKSI PEMERINTAHAN
33.	PAMONG PEMERINTAHAN	S-1 EKONOMI ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | KECAMATAN WERU | SEKSI PEMERINTAHAN
34.	PAMONG PEMERINTAHAN	S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; D-IV LAYANAN PUBLIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | KECAMATAN NGUTER | SEKSI PEMERINTAHAN
35.	PAMONG PEMERINTAHAN	S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 MANAJEMEN ; D-IV LAYANAN PUBLIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | KECAMATAN MOJOLABAN | SEKSI PEMERINTAHAN
36.	PAMONG PEMERINTAHAN	S-1 EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | KECAMATAN KARTASURA | SEKSI PEMERINTAHAN
37.	PAMONG PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | KECAMATAN TAWANGSARI | SEKSI PEMERINTAHAN
38.	PAMONG PEMERINTAHAN	S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | KECAMATAN SUKOHARJO | SEKSI PEMERINTAHAN
39.	PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA	D-IV PEKERJAAN SOSIAL ; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | DINAS SOSIAL | BIDANG REHABILITASI SOSIAL
40.	PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA	D-IV PEKERJAAN SOSIAL ; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | DINAS SOSIAL | BIDANG PENANGANAN DAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
41.	PELATIH OLAHRAGA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KEOLAHRAGAAN ; S-1 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | BIDANG KEOLAHRAGAAN
42.	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | BIDANG CIPTA KARYA
43.	PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IR. SOEKARNO | WAKIL DIREKTUR ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | BAGIAN HUMAS, HUKUM, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | SUBBAG HUKUM DAN KERJASAMA

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
44.	PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | DINAS KESEHATAN | BIDANG PELAYANAN KESEHATAN, PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
45.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN PEMERINTAHAN
46.	PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 TEKNIK MESIN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL PENANAMAN MODAL
47.	PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEGAWATDARURATAN ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 EKONOMI ; S-1 GEOGRAFI ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
48.	PENATA PERIZINAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU POLITIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
49.	PENERA AHLI PERTAMA	S-1 FISIKA ; S-1 MATEMATIKA ; S-1 TEKNIK FISIKA ; S-1 TEKNIK INDUSTRI ; S-1 TEKNIK MESIN ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN | UPTD METROLOGI LEGAL | SUBBAG TU UPTD METROLOGI LEGAL
50.	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK KIMIA ; S-1 TEKNIK INDUSTRI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | BIDANG PENGKAJIAN DAMPAK DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP
51.	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 AKUNTANSI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | INSPEKTORAT DAERAH | INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS
52.	PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT	S-1 EKONOMI ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK MESIN ; D-IV MANAJEMEN KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN ; D-IV TEKNIK KESELAMATAN OTOMOTIF ; S-1 HUKUM ; S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | DINAS PERHUBUNGAN | BIDANG OPERASI DAN PENGENDALIAN
53.	PENGELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III HUBUNGAN MASYARAKAT ; D-III MANAJEMEN ; D-III KEARSIPAN ; D-III PARALEGAL ; D-III PEMBANGUNAN SOSIAL ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III SOSIOLOGI PEDESAAN ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | BIDANG KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
54.	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 HUKUM ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK INDUSTRI ; S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
55.	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | BIDANG SUMBER DAYA AIR
56.	PENGEMBANG KEWIRAUSAHAAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 PERTANIAN BERKELANJUTAN ; S-1 PETERNAKAN ; S-1 PERIKANAN TANGKAP ; S-1 STATISTIKA ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN ; S-1 DESAIN PRODUK INDUSTRI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN | BIDANG USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
57.	PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI PERTAMA	S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN ; D-IV PRODUKSI MEDIA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL
58.	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | BIDANG PENATAAN DAN KERJASAMA DESA
59.	PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK KIMIA ; S-1 TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN ; S-1 KIMIA ; S-1 ILMU LINGKUNGAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH B3 DAN LIMBAH NON B3
60.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 AKUNTANSI ; D-IV AKUNTANSI ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN | SEKRETARIAT | SUBBAG PERENCANAAN
61.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 HUKUM ; S-1 POLITIK ; S-1 EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
62.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; S-1 MANAJEMEN ; D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 HUKUM ; D-IV AKUNTANSI ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | DINAS PANGAN | SEKRETARIAT | SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
63.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | SEKRETARIAT | SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
64.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 HUKUM ; S-1 POLITIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
65.	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
				PUBLIK
66.	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI ; D-III MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
67.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI ; D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS ; D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | SEKRETARIAT | SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
68.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI ; D-III SISTEM INFORMASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
69.	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III MANAJEMEN PERKANTORAN ; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN UMUM | SUBBAG TATA USAHA PIMPINAN, STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN
70.	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI NEGARA ; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III MANAJEMEN ; D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG MUTASI
71.	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III MANAJEMEN ; D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA ; D-III ADMINISTRASI NEGARA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | SEKRETARIAT | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
72.	PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PERPUSTAKAAN ; D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL ; S-1 PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | BIDANG PERPUSTAKAAN
73.	TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	S-1 TEKNIK SIPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | DINAS KESEHATAN | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IR. SOEKARNO | WAKIL DIREKTUR ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | BAGIAN UMUM | SUBBAG RUMAH TANGGA DAN ASET
74.	TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	S-1 TEKNIK SIPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO | DINAS KESEHATAN | BIDANG KEFARMASIAN DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN